

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

*Achmad Ali, 2002, Menguat Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis, Gunung Agung. Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta.*

*Adami Chazawi, 2005, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing.*

*Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentari), Yogyakarta: Rangkang Education.*

*Andi Munawarman, 2006, Sejarah Singkat Polri, Surabaya: Narasi Polisi.*

*Andi Sofyan, 2012, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Yogyakarta: Rangkang Education.*

*Andriansyah, 2015, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (cetakan pertama), Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).*

*Bisri Ilham, 1998, Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Grafindo Persada.*

*Didik Endro Purwoleksono, 2016, Hukum Pidana, Surabaya: Airlangga University Press. Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP).*

*F. Y. Kanter & S. R. Sianturi, 2002. Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Jakarta: Stora Grafika.*

*F.A.M stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006, Wewenang Mahkamah Konsitusi dan Aplikasinya dalam Sistem ketatanegara Republik Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti.*

*Hasbullah F. Sjawie, 2017, Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Cetakan ke satu), Depok: Kencana Prenadamedia Group.*

*Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, Penelitian Hukum; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta: Penerbit Mirra Buana Media.*

- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Press.*
- M. Barama, 2011, Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tindak di Pidana. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.*
- M. Husein Harun, 2007, Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.*
- M. Sofyan Lubis, 2010, Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan, Jakarta: Pustaka Yustitia.*
- M. Yahya Harahap, 2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika.*
- Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.*
- Momo Kelana, 1972, Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu Studi Historis Komperatif, Jakarta: PTIK.*
- Muhammad Ainul Syamsu, 2016, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana (cetakan ke-1), Jakarta: Pranadamedia Group.*
- Mukhlis, 2019, Tindak pidana di bidang pertanahan di kota Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum.*
- Munir Fuady, 2002, Perbuatan Melawan Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti.*
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, 2010, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan, Yogyakarta: Liberty.*
- Nurmayani, 2009, Hukum Administrasi Daerah, Bandar Lampung: Universitas Lampung.*
- Philipus M Hadjon, 1998, Tentang Wewenang, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.*
- Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.*
- R. Abdussalam, 1997, Penegakan hukum Di Lapangan Oleh Polri, Jakarta: Dinas Hukum Polri.*

- R. Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana; Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum*, Bogor: Politeia.
- Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum, Cetakan Keenam*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sitompul, 1985, *Polisi dan Penangkapan*, Bandung: Tarsito.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Belukny (edisi kedua)*, Depok: Kencana.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana (Cetakan Pertama)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Topo Santoso, 2018, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana (cetakan kesatu)*, Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana.
- W. Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- W. J. S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHPidana*)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang *Penyidikan Tindak Pidana*

**JURNAL / KARYA ILMIAH**

- H. Muhammad Syarif Nuh, 2012, Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal MMH, Vol. 41.
- T. Erwinsyahbana & M. Melinda, 2018, Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir, Jurnal Lentera Hukum.

**PUTUSAN**

Putusan Nomor: 5/Pid.Pra/2021/PN.Mks.